

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ali, Chaidir. *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 1987).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Setjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
- Azhary, Muhammad Tahir,. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. (Jakarta: Pernada Media Group, 2012).
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).
- _____. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Azis, Muhammad Husen. *Hak Berserikat Dan Berkumpul Warga Negara Asing Dalam Pendirian Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia*, (Jurist-Diction, 1.2 2018).
- Bali, Badan Diklat Provinsi. *Modul Pariwisata Berbasis Warisan Budaya (Heritage Tourism)*, (Denpasar: 2014).
- Dimock, *Public Administration*, (New York: Rinehart Inc., 1960).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Ence, Iriyanto A.Baso. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, (Bandung : PT Alumni, 2008).
- Etzioni, Amitai. *Organisasi-Organisasi Modern*, (Jakarta: Kencana Premada, 2007).
- Hamzani, Achmad Irwan. *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Jurnal Yustisia, 90, 2017).
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Onsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia*, 1st edn (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003).
- Henry, Nicholas. *Administrasi Negara dan Masalah Kenegaraan*, Terjemahan Luciana, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998).

- Hertanto, Ari Wahyudi and Sugito Sujadi, *Ilmu Negara, Konstitusi, Dan Keadilan, 1st edn* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2007).
- Hidayat, Arif. *Kepastian Hukum Harus Sejalan Dengan Rasa Keadilan*, *Antaraneews.Com, 2010* (diakses 20 April 2021).
- Kabudi, P.J., *Human Rights Jurisprudence in East Africa: A Comparative Study of Fundamental Rights and Freedoms of the Individual in Tanzania, Kenya, and Uganda*, (BadenBaden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1965).
- Kamil, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta : Kencana, 2008).
- Kansil, C.S.T. et. Al, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Karim, M. Rusli. *Negara dan peminggiran Islam Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)
- Koesnardi, Moh. and Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 1976).
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 1983).
- Latipulhayat, Atip. *Due Process of Law*, (Padjajaran: Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, 2017).
- Machmudi, Yon., *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*. (Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke- 8, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013).
- _____. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Nawawi, Wahyudin. *Teori Organisasi*, (Majalengka : Unit Penerbitan Universitas, 2013).
- Ng, Al-Zastrouw. *Gerakan Islam Simbolik: Partai Kepentingan FPI*.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
- Radjab, Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2003).
- Shepard, William. *What is Islamic Fundamentalism?* (Study in Religion 17, 1, 1988).
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009).
- Simarmata, Lihat Henry. Kovenan HAM Internasional: Pandangan Umum mengenai Signifikansi dan Perkembangan, Jurnal HAM 2007 (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007).
- Siregar, Raja Adil. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul Dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, (JOM Fakultas Hukum, 2.2 2015).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011).
- Suartama, I Gede Putu Jaya. *Peran Pemerintah Terhadap Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, Makalah disampaikan pada Kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas dan LSM Provinsi Bali*, (Denpasar: 2015).
- Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun; Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Thaib, Dahlan. *Ketatanegaraan Indonesia Prespektif Konstitusional*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Total Media, 2009).
- Tyagita, Andanti. *Prinsip Kebebasan Berserikat Dalam Serikat Buruh Sebagai Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hak Normatif Pekerja*, (Jakarta: Yuridika, 2011).
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962).
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum, 1st edn* (Jakarta: Graha Indonesia, 1983).
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, 2nd edn* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Winayanti, Nia Kania. *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisa, 2011).

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. Pasal 1 Angka 1 *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan* (“Perpu 2/2017”)

Indonesia. Pasal 1 angka 5 *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan* (“PP 58/2016”)

Indonesia. Pasal 1 ayat (1) *Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*

Indonesia. Pasal 10 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan* (“UU 17/2013”)

Indonesia. Pasal 2 dan 3 *Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*

Indonesia. Pasal 28 J Ayat 2 *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Indonesia. *Penjelasan Pasal 61 ayat (3) Perpu 2/2017*

Indonesia. Undang – Undang Dasar 1945 BAB X A amandemen ke 2.

Indonesia. Undang – Undang Dasar 1945 BAB X A amandemen ke 2.

Indonesia. Undang – Undang Dasar 1945 BAB X A amandemen ke 2.

C. Jurnal :

Djafar, Wahyudi. *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, (Jurnal Konstitusi, 7, 5, 2017) hal 153.

Jurnal Ilmu Hukum Edisi Mei-November 2014. (Mimbar Keadilan)

D. Website :

Anonim, *"organisasi massa / Arti Kata organisasi massa"*. www.kamusbesar.com (diakses tanggal 7 Febuari 2021)

Anonim, *"FPI "Sweeping" Tempat Hiburan Malam"*. Liputan6.com. 8 Agustus 2010. (Diakses tanggal 5 Mei 2021).

- Anonim, "organisasi massa / Arti Kata organisasi massa".
www.kamusbesar.com (diakses tanggal 7 Februari 2021)
- Anonim, Bali Post, 2015, *Untuk Kepentingan Politik Pemimpin "Pelihara Ormas"*
- Anonim, <http://www.un.org/en/documents/udhr/> (diakses pada tanggal 1 Juni 2021)
- Anonim, <https://lokadata.id/artikel/fpi-memang-bermasalah-tapi-pembubaran-harus-melalui-proses-peradilan>. (diakses pada tanggal 6 Juni 2021).
- Anonim, <https://mastel.id/mastel-anggota-jokowi-sudah-tandatangani-pembubaran-6-ormas-radikal%20berdasarkan-perppu-2-2017-2/>. (diakses pada tanggal 26 Juni 2021).
- Anonim, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/13205551/isi-lengkap-skb-tentang-pembubaran-dan-pelarangan-kegiatan-fpi?page=all> (diakses pada tanggal 26 Januari 2021)
- Anonim, <https://news.detik.com/berita/d-5315789/4-alasan-pemerintah-tetapkan-fpi-ormas-terlarang-di-ri/4> (Diakses Pada Tanggal 26 Juni).
- Anonim, <https://www.antarafoto.com/bisnis/v1609332901/penutupan-markas-fpi>, (diakses pada tanggal 4 Juni 2021)
- Anonim, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/12/30/1636/komnas-ham-pembubaran-ormas-harus-sesuai-konstitusi.html>, (diakses pada tanggal 14 Juni 2021).
- Anonim, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52779/1/KHAIDIR%20ALI-FSH.pdf>. (Diakses pada tanggal 26 Juni 2021).
- Indonesia: Implications of the Ahmadiyah Decree (PDF). *International Crisis Group Update Briefing* (dalam bahasa Inggris). Jakarta/Brussels: International Crisis Group (78). 7 Juli 2008. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2017-12-15. (Diakses tanggal 7 Mei 2021).
- Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, hal 55-56.
- Jimlyschool.com* (diakses tanggal 10 April 2021)
- M Andika Putra; Raja Eben Lumbanrau "*Jejak FPI dan Status 'Napi' Rizieq Shihab*". *CNN Indonesia*. (diakses pada tanggal 7 Mei 2021)

E. Wawancara :

Fernando, wawancara pribadi dengan MR X selaku mantan anggota FPI, Pada tanggal 3 Juni 2021.

Fernando, wawancara pribadi dengan MR X selaku mantan anggota FPI, Pada tanggal 4 Juni 2021.

Indra, Putu Agung Nara (4 November 2016). "*FPI dalam Lintasan Sejarah*". *Tirto.id*. (Diakses tanggal 2 Febuari 2021).